DAFTAR PUSTAKA

- Abba, M., Bello, A., & Aliyu, S. M. (2015). Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *International Refereed Research Journal*, 6(3), 1.
- Adriani, N. L. G. C., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11), 44579.
- Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua. *Penerbit PT. Indeks. Jakarta*.
- Firdausy, C. (Ed.). (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25." (2013).
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran*. Penerbit Salemba.
- Idris, I. F. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. *European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research*, 4(1), 28-42.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, Otonomi, and Manajemen Keuangan Daerah. "Penerbit Andi." (2004).
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Saragih, J. P., & Khadafi, M. S. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2.

- Suhendi, E. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005. *Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Indonesia*.
- Sulistiyowati, D., & DUL MUID, D. M. (2011). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Suryana, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. *JURNAL ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS*, 9(2), 67-72.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yawa, H., & Runtu, T. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- Nomor, U. U. (34). Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. *Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 55*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Nomor, U. U. R. I. (28). Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007. *Jakarta: Kemendagri RI*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara RI Tahun, 140*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).